



PENETAPAN

Nomor 0128/Pdt.P/2020/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muliadi bin Mappiare, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Abbanuange, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan kedua orangtua calon suami.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2020/PA Wsp.dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang Perempuan bernama Hasni binti Summa adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama Putri Andini binti Muliadi, berstatus Gadis, bertempat tinggal di Abbanuange, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Indrokilo pada tanggal 27 November 2003 (16 tahun 7 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ayah kandung yang dimohonkan dispensasi nikah dikarenakan ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah sudah bercerai dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan;

Hal 1 dari 14 hal Pen No.0128/Pdt.P/2020/PA.Wsp



3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama Asriadi bin Pangara, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Lagoci, Desa Timusu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Perpanen sebesar Rp 2.000.000.00 (*dua juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampumandiri dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua

Hal 2 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Putri Andini binti Muliadi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Asriadi bin Pangara)**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai laki-laki untuk mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 18 tahun 11 bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan di bawah umur itu berpotensi terhadap putusnya pendidikan anak tersebut sementara pendidikan adalah hak dasar, dari segi kesehatan yaitu dimana organ reproduksi anak belum siap sehingga berisiko jika anak tersebut nanti hamil yang dapat membahayakan bagi ibu dan bayinya karena menurut statistik WHO anak yang hamil usia 10-14 tahun mempunyai resiko meninggal dunia saat melahirkan lima kali lebih besar dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Sedangkan dampak ekonomi bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan

Hal 3 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sementara dari dampak sosial dan psikologis, bagi pernikahan di bawah umur akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat yang berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, juga tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha penasehatan dari hakim tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang bernama Nur Hedriana binti Nurdin yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai perempuan sekarang ini baru berumur 18 tahun 11 bulan dan sudah haid.
- Bahwa calon mempelai perempuan kenal dengan calon mempelai laki-laki yang bernama Muh. Nur bin Bustan kurang lebih tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai perempuan ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama Muh. Nur bin Bustan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap untuk berumah tangga.



- Bahwa calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai perempuan sejak dua tahun yang lalu.
- Bahwa calon mempelai laki-laki ingin menikah berdasarkan kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi hanya didasarkan keinginan berdua dan sudah saling cinta mencintai.
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sekarang ini sebagai petani yang mempunyai penghasilan perpanen Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perpanen.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua dari calon mempelai laki-laki yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar di pihak calon mempelai perempuan dan lamarannya telah diterima dan telah disetujui akan dilaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2020.
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang belanja kepada pihak mempelai perempuan.
- Bahwa anaknya (calon mempelai laki-laki) telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani yang mempunyai penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perpanen.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7312012412840001 tertanggal 21 Juli 2016 a.n. Muliadi yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Soppeng, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 68/IST/A/BK-KB/LU/2006 tanggal 6 Januari 2006 a.n. Putri Andini yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan nomor B-0533/Kua/21.20.05/Pw.01/06/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. H. Marzuki bin Lapatu memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon.
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Andini binti Muliadi tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama 1 tahun, dan sering keluar berdua sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama keluarga.
 - Bahwa anak Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 22 Juni 2020.
 - Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja kepada keluarga mempelai perempuan.

Hal 6 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perpanen.
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

2. Laba bin Cake, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon II.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Andini binti Muliadi tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Lalabata karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki telah pacaran selama 1 tahun, dan sering keluar berdua sehingga Pemohon khawatir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama keluarga.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu dan biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar dan lamarannya telah diterima dan rencana menikah pada tanggal 22 Juni 2020
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki telah menyerahkan uang naik atau uang belanja kepada calon keluarga mempelai perempuan.
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilannya Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perpanen.

Hal 7 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon yang didengarkan pula oleh anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Andini binti Muliadi belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak bisa lagi menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan pacaran selama satu tahun sehingga jika pernikahan mereka dibatalkan atau diundur akan membuat malu bagi keluarga calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai perempuan serta calon mempelai laki-laki dan kedua orangtuanya yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka dan keduanya sudah saling mengetahui kepribadian



masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti P.1 sampai P.3 telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka secara formil kedua bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Watansoppeng sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Putri Andini lahir pada tanggal 27 November 2003 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata

Hal 9 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama H. Marzuki bin Lapatu dan Laba bin Cake yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan calon mempelai serta bukti surat serta keterkaitan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Putri Andini binti Muliadi.
- Bahwa Putri Andini binti Muliadi lahir pada tanggal 27 November 2003 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun.
- Bahwa Putri Andini binti Muliadi dengan calonnya yang bernama Asriadi bin Pangara, sudah 1 tahun menjalin cinta/pacaran.
- Bahwa pihak keluarga Putri Andini binti Muliadi dan pihak keluarga Asriadi bin Pangara, telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya pada tanggal 22 Juni 2020.

Hal 10 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



- Bahwa pihak keluarga Asriadi bin Pangara telah menyerahkan uang belanja/uang naik dan pihak keluarga Putri Andini binti Muliadi telah membelanjakan uang tersebut sebagian untuk persiapan resepsi pernikahan anaknya nanti.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Putri Andini binti Muliadi dengan Asriadi bin Pangara karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Putri Andini binti Muliadi dan Asriadi bin Pangara tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa Putri Andini binti Muliadi dan Asriadi bin Pangara telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga agar Putri Andini binti Muliadi mau menikah dengan Asriadi bin Pangara.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah 2 tahun lebih berpacaran dan saling mencintai dan sudah sering keluar berdua sehingga keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) yang rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, maka

Hal 11 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp



untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa karena lamarannya telah diterima dan hari pernikahan telah ditetapkan bahkan uang belanja atau uang naik telah diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dan keluarga pihak mempelai perempuan telah membelanjakan sebagian dari uang naik tersebut untuk mempersiapkan pernikahan mereka, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, dengan surat Penolakan Nomor B-0533/Kua.21.20.05/Pw.06/2020 tanggal 8 Juni 2020.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Putri Andini binti Muliadi** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Asriadi bin Pangara**.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Salmirati, S.H., M.H., sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. PNBP Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal.Pen.No.0125/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)